LAPORAN PENILAIAN MANDIRI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)

Isi Dokumen:

Laporan Hasil Kegiatan

BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

Overview

Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem pengendalian intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi maupun kegiatan pemerintah. Hal ini diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP dapat diawali dengan pembangunan falsafah manajemen risiko (lingkungan pengendalian dalam arti sempit), penetapan tujuan organisasi dan tujuan kegiatan, identifikasi dan penilaian risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, pembangunan mekanisme informasi dan komunikasi yang dapat mengukur dan melaporkan risiko aktual dan biaya yang ditimbulkan, monitoring, dan pengembangan lingkungan pengendalian dalam arti luas.

Langkah tersebut diterapkan dari tingkat aktivitas, unit organisasi, dan diintegrasikan untuk entitas organisasi secara menyeluruh. Monitoring dan perbaikan yang berkelanjutan akan menjamin SPIP dapat berfungsi efektif. Berdasarkan hal tersebut penting untuk melakukan optimalisasi SPIP yang terintegrasi

A. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, di mana Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai entitas penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/501/IV/KA/OT.05/2024/BNN tanggal 18 April 2024 Tentang Tim Pengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.
4. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: KEP/68/V/KA/OT.05/2024/BNNP Tentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

B. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

1. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/ Kota.

C. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian yakni :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

D. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023/2024 sebagai berikut :

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI
			SPIP	MRI	IEPK	
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika					**4.000**
1.1	1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	SPIP	-	-	**4.000**
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi					**4.000**
1.2	1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	**4.000**
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif					**4.000**
1.3	1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	**4.000**

1.3	2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	SPIP	MRI	-	**4.000**
1.3	3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPIP	MRI	-	**5.000**
1.3	4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	SPIP	MRI	-	**3.000**
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan					**4.000**
1.4	1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	SPIP	-	-	**4.000**
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat					**4.000**
1.5	1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	**4.000**

		Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan				
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					**4.000**
1.6	1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	SPIP	-	-	**4.000**
1.6	2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	**4.000**
1.6	3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	**4.000**
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif					**3.000**
1.7	1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	SPIP	-	-	**3.000**
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait					**4.500**
1.8	1	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	**5.000**
1.8	2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	SPIP	MRI	-	**4.000**
2.1	Identifikasi Risiko					**3.666**
2.1	1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	SPIP	MRI	-	**3.000**

2.1	2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPIP	MRI	-	**4.000**
2.1	3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	SPIP	MRI	-	**4.000**
2.2	Analisis Risiko					**4.200**
2.2	1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	SPIP	MRI	-	**5.000**
2.2	2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	SPIP	MRI	-	**4.000**
2.2	3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPIP	MRI	-	**4.000**
2.2	4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	SPIP	MRI	-	**4.000**
2.2	5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	SPIP	MRI	-	**4.000**
3.1	Reviu atas Kinerja					**5.000**
3.1	1	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	**5.000**
3.2	Pembinaan SDM					**4.000**
3.2	1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	**4.000**
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi					**4.000**
3.3	1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	SPIP	-	-	**4.000**

3.4	Pengendalian Fisik atas Aset					**5.000**
3.4	1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	SPIP	-	-	**5.000**
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja					**4.000**
3.5	1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	SPIP	-	-	**4.000**
3.6	Pemisahan Fungsi					**5.000**
3.6	1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	SPIP	-	-	**5.000**
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting					**5.000**
3.7	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	SPIP	-	-	**5.000**
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian					**5.000**
3.8	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	SPIP	-	-	**5.000**

3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya					**5.000**
3.9	1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	SPIP	-	-	**5.000**
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya					**5.000**
3.10	1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	**5.000**
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting					**5.000**
3.11	1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	SPIP	-	-	**5.000**
4.1	Informasi yang Relevan					**4.250**
4.1	1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	SPIP	-	-	**4.000**
4.1	2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	SPIP	MRI	-	**5.000**
4.1	3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	SPIP	MRI	-	**4.000**
4.1	4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPIP	MRI	-	**4.000**
4.2	Komunikasi yang Efektif					**4.000**

4.2	1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	SPIP	-	-	**4.000**
5.1	Pemantauan Berkelanjutan					**4.000**
5.1	1	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	SPIP	-	-	**4.000**
5.1	2	Proses manajemen risiko telah direviu	SPIP	MRI	-	**4.000**
5.1	3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	SPIP	MRI	-	**4.000**
5.2	Evaluasi Terpisah					**4.500**
5.2	1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	SPIP	-	-	**5.000**
5.2	2	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	SPIP	MRI	-	**4.000**

Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses Peniaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian (1.1 s.d 1.8)

1. Unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)

   BNNP DIY telah menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

2. Unsur Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)

   BNNP DIY telah melakukan komitmen bahwa tugas dan jabatan yang ada pada BNNP DIY dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten.

3. Unsur Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)

   Bahwa Pimpinan BNNP DIY telah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi. Bahwa Pimpinan BNNP DIY telah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko. Bahwa Pimpinan BNNP DIY telah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan. Bahwa Pimpinan BNNP DIY telah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja.

4. Unsur Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan (1.4)

   Struktur organisasi dibentuk pada BNNP DIY dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi juga dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan asset. Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.

5. Unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)

   Bahwa pada BNNP DIY wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian wewenang dan tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan

6. Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)

   Bahwa BNNP DIY telah melaksanakan penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Pegawai BNNP DIY telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko. Pegawai BNNP DIY telah memiliki kesadaran terkait manajemen risiko.

7. Unsur Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)

   Secara periodik Pengawasan APIP yang dilakukan terhadap BNNP DIY telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi

8. Unsur Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)

   Pimpinan BNNP DIY telah menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam

rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, BNNP DIY telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan.

b. Penilaian Risiko (2.1 dan 2.2)

1. Unsur Identifikasi Risiko (2.1)

   Bahwa BNNP DIY telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko. Risiko yang ada pada BNNP DIY telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko. Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis yang terdapat pada BNNP DIY.

2. Unsur Analisis Risiko (2.2)

   Bahwa Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya. BNNP DIY telah menentukan prioritas risiko. BNNP DIY telah menentukan rencana tindak pengendalian. Tindak pengendalian telah diimplementasikan dan efektif menurunkan risiko.

c. Kegiatan Pengendalian (3.1 sd 3.11)

1. Unsur Reviu atas Kinerja (3.1)

   Pimpinan BNNP DIY telah membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.

2. Unsur Pembinaan SDM (3.2)

   Pembinaan SDM dilakukan di BNNP DIY sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Unsur Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)

   Pada BNNP DIY telah dilaksanakan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.

4. Unsur Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)

   Pengelolaan BMN yang dilakukan di BNNP DIY untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

5. Unsur Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)

   Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan di BNNP DIY untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.

6. Unsur Pemisahan Fungsi (3.6)

   Terdapat pemisahan fungsi di BNNP DIY sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang.

7. Unsur Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)

   Pada BNNP DIY terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

8. Unsur Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)

   Pada BNNP DIY juga terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen.

9. Unsur Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)

   Pada BNNP DIY terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya

10. Unsur Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)

    Pada BNNP DIY terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

11. Unsur Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)

    Pada BNNP DIY terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait.

d. Informasi dan Komunikasi (4.1 sd 4.2)

1. Unsur Informasi yang Relevan (4.1)

   Pada BNNP DIY tersedia informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal. Pimpinan BNNP DIY telah membangun sistem pengaduan. Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan. Sedangkan register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait.

2. Unsur Komunikasi yang Efektif (4.2)

   Pada BNNP DIY telah terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal BNNP DIY dan pihak eksternal.

e. Pemantauan (5.1 dan 5.2)

1. Unsur Pemantauan Berkelanjutan (5.1)

   Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional BNNP DIY mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini telah dilakukan reviu proses manajemen risiko dan pemantauan/monitoring terhadap risiko.

2. Unsur Evaluasi Terpisah (5.2)

   Evaluasi terpisah dilakukan kepada BNNP DIY oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi. Juga terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko

E. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Perlu sekali dilakukan bimbingan teknis untuk melakukan peningkatan maturitas penyelenggaran SPIP yang ada dalam lingkup Badan Narkotika Nasional maupun satker yang ada di wilayah agar maturitas penyelenggaran SPIP semakin meningkat.

F. Penutup

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Penilai Mandiri

Ari Sutyasmanto, Apt. ……

Ariska Windra Cahyaningrum, SH, MH ……